



PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019





BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DOLLAH MANDO
Jabatan : BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkajene Sidenreng, 7 Januari 2019


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO



PERJANJIAN KINERJA 2019
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Angka melanjutkan wajib belajar 9 tahun dari SD/MI ke SMP/MTs.	70%
		Angka putus sekolah wajib belajar 9 tahun SD/MI.	0,7%
		Angka putus sekolah wajib belajar 9 tahun SMP/MTs.	1%
		APM wajib belajar 9 tahun SD/MI Paket A.	85%
		APM wajib belajar 9 tahun SMP/MTs Paket B.	45%
		Angka kelulusan wajib belajar 9 tahun SD.	100%
		Angka kelulusan wajib belajar 9 tahun SMP.	100%
		Jumlah SD yang dibangun.	- Unit
		Jumlah SMP yang dibangun.	- Unit
		Jumlah SD yang direhabilitasi.	15 Unit
		Jumlah SMP yang direhabilitasi.	15 Unit
		Jumlah SD Yang memiliki perpustakaan.	230 Unit
		Jumlah SMP Yang memiliki perpustakaan.	46 Unit
		Pendidikan usia dini APK PAUD/TK.	50%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Cakupan rumah tangga ber-PHBS.	37.500 Rumah
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.	1 Balita
		Prevalensi stunting pada balita.	28%
		Presentase penduduk yang menggunakan air minum sehat.	100%
		Presentase penemuan dan penanganan penyakit menular.	100%
		Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan.	100%
		Jumlah anak balita yang dilayani.	100%
		Jumlah lansia yang dilayani.	100%
		Angka kematian ibu.	100%
		Jumlah penemuan dan penanganan penyakit tidak menular.	100%
		Peningkatan kesehatan masyarakat desa dan kelurahan.	100%
		Presentase pemenuhan obat difasilitas kesehatan.	100%
		Cakupan pengawasan dan obat dan makanan di apotek dan pasar.	50 Apotek / Pasar
		Cakupan biaya dan pemeliharaan puskesmas.	14 Puskesmas
		Rumah sakit pratama yg dibangun.	100%
		Puskesmas yg dibangun.	11 Paket
		Poskesdes yg dibangun.	5 Unit
Puskesmas yg dibangun.	1 Unit		

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor perekonomian daerah.	<p>Puskesmas yang direhabilitasi. Poskesdes yang direhabilitasi. Puskesmas pembantu yang direhabilitasi. Jumlah puskesmas yang bersertifikat atau akreditasi. Cakupan KB aktif. Cakupan akseptor KB. Cakupan pembentukan kelompok masyarakat pedulu KB. Tersediannya obat dan perbekalan kesehatan. Pengembangan model operasional BKB posyandu. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Terstandarisasinya pelayanan di rumah sakit. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jumlah indikator SPM Yang tercapai pada program upaya kesehatan masyarakat. Jumlah indikator SPM Yang tercapai pada program standarisasi pelayanan kesehatan. Jumlah indikator SPM Yang tercapai pada program pelayanan kesehatan masyarakat miskin.</p> <p>Jumlah indikator SPM Yang tercapai pada rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata. Jumlah indikator SPM Yang tercapai pada pelayanan kesehatan BLUD.</p> <p>Produksi Tanaman Pangan : Produksi padi meningkat 5% per tahun. Produksi jagung meningkat 5% per tahun. Produksi Holtikultura : Produksi cabe besar meningkat 10% per tahun. Produksi cabe rawit meningkat 18% per tahun. Produksi bawang merah meningkat 1% per tahun. Produksi semangka meningkat 1% per tahun. Produksi durian meningkat 5% per tahun. Produksi Perkebunan : Produksi cengkeh meningkat 7% per tahun. Produksi kopi meningkat 8% per tahun. Produksi lada meningkat 4% per tahun. Produksi Peternakan : Jumlah ternak sapi. Jumlah ternak kambing. Jumlah ternak ayam buras.</p>	<p>11 Paket 6 Unit 1 Unit 7 Puskesmas 47.700 PUS 5.8 PUS 20 Kelompok 100% 100% 100% Lulus Utama 1 Paket 105 Item 105 Item 105 Item</p> <p>105 Item 105 Item</p> <p>617.381 Ton 99.238 Ton</p> <p>10.230.00 Ton 44.58.04 Ton 297.95 Ton 668.00 Ton 14.912.10 Ton</p> <p>663.70 Ton 297.62 Ton 87.4 Ton</p> <p>38.768 Ekor 6.587 Ekor 713.226 Ekor</p>

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi golongan tidak mampu Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah.	<p>Produksi perikanan : Jumlah produksi budi daya perikanan. Jumlah produksi perikanan tangkap. Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH). Jumlah wirausahaan baru. Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil dan menengah. Cakupan peningkatan kapasitas pelaku industri.</p> <p>Angka kemiskinan. Tersedianya data dan informasi penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Nilai investasi PMDN dan PMA . Jumlah investor.</p> <p>Jumlah angkatan kerja yang dilatih. Jumlah tenaga kerja yang dilindungi.</p>	<p>575.113 Ton 3.392.00 Ton 86 Kkal 50 WUB 18% 330 Orang 5.02% 3 Laporan Rp 157.002.306.000 194 Badan / Perusahaan /Perorangan 200 AK 40 Perusahaan</p>
5	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah.	<p>Kunjungan wisata. Lama kunjungan wisata.</p>	<p>500.000 Orang 1 Hari</p>
6	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah.	<p>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Jumlah saluran drainase / gorong-gorong terbangun. Jumlah talud untuk memperkuat jaringan jalan yang terbangun. Terpeliharanya jaringan jalan dan jembatan. Jumlah infrastruktur pedesaan yang terbangun. Terpeliharanya jaringan prasarana dan fasilitas LLAJ. Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas Presentase kepemilikan KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang</p>	<p>72.96% 1.5% 37% 2% 100% 75% 100% 100% 100%</p>
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	<p>Nilai SAKIP. Terjalinnnya koordinasi dalam kerjasama pembangunan daerah. Keselarasan antar dokumen perencanaan . Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perda. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD. Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan perda.</p>	<p>Nilai C 6 Laporan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100%</p>

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>Terwujudnya kebijakan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.</p> <p>Tersusunnya dokumen data infrastruktur wilayah.</p> <p>Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.</p> <p>Jumlah dokumen PSETK.</p> <p>Berita acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi keamanan informasi dan penetapan tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan.</p> <p>Hasil inventarisasi tentang data celah kerawanan dan nilai resiko keamanan informasi.</p> <p>Laporan tentang insiden keamanan informasi dan pemulihan data.</p> <p>Jumlah media (mediacetak dan elektronik).</p> <p>Kualitas layanan akses informasi.</p> <p>Jumlah kompilasi produk statistic sektoral yang tersedia.</p> <p>Presentase perangkat dan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpasang dan digunakan.</p> <p>Jumlah informasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p> <p>Jumlah pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan.</p> <p>Jumlah pengesahan terhadap pencemaran lingkungan.</p> <p>Jumlah kualitas dan akses informasi lingkungan hidup disekolah.</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh bantuan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana.</p> <p>Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan.</p> <p>Cakupan kedaduratan dan logistik.</p> <p>Tertatanya pengelolaan administrasi kependudukan.</p> <p>Presentase volume arsip yang didata, ditata dan dilestarikan</p> <p>Peningkatan SDM pengelolaan arsip.</p> <p>Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dan jumlah perpustakaan yang dibina.</p> <p>Terwujudnya kelembagaan bumdes yang mandiri.</p> <p>Meningkatnya pelayanan dan kualitas perizinan yang optimal berbasis IT.</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar berbasis SPM.</p>	<p>100%</p> <p>5 Dukumen</p> <p>8 Program</p> <p>50 PSETK</p> <p>3 Kegiatan</p> <p>3 Kegiatan</p> <p>2 Kegiatan</p> <p>100%</p> <p>13 Media Online</p> <p>5 Jenis buku</p> <p>60%</p> <p>730 Pengaduan</p> <p>61,11 Ha</p> <p>16 Usaha</p> <p>18 Sekolah</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>120 Unit/Box</p> <p>1 SKPD/ Exp</p> <p>5.69 Unit</p> <p>15 Bumdes</p> <p>5.000 Izin</p> <p>80 Nilai</p>
8	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar berbasi SPM.</p> <p>Jumlah warga negara usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD / MI, SMP / Mts).</p> <p>Jumlah warga negara usia 17 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.</p> <p>Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.</p> <p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.</p> <p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.</p> <p>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.</p>	<p>Nilai B</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. 100%</p> <p>Jumlah warga negara korban banan yang memperoleh rumah layak huni. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumag layak huni. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara. 100%</p> <p>Informasi rawan bencana. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 100%</p> <p>Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh rehabilitasi spsial di luar panti. 100%</p> <p>Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. 100%</p> <p>Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. 100%</p> <p>Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. 100%</p>	
9	Terwujudnya kemandirian	<p>Presentase desa berkualifikasi desa cerdas. 8.82%</p> <p>Jumlah desa dengan kategori mandiri. 6 Desa</p>	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Meningkatnya aktifitas sosial dan keagamaan.	<p>Forum / pokja yang terbentuk dalam rangka cegah dini dan deteksi dini.</p> <p>Masyarakat yang mendapatkan pemahaman dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan.</p> <p>Masyarakat yang mendapatkan pemahaman dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan.</p> <p>Ormas Yang dibina.</p> <p>Forum / pokja yang terbentuk dalam rangka cegah dini dan deteksi dini dalam pencegahan tindak kriminal.</p> <p>Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik.</p> <p>Cakupan peningkatan kegiatan kesadaran bela negara.</p> <p>Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p> <p>Terselenggaranya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pengawasan, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta upaya pencegahan tindak kriminal.</p> <p>Terwujudnya kesadaran dan ketaatan aparaturnya masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah dan peraturan bupati.</p>	<p>2 Forum / pokja 65 Orang</p> <p>400 Orang</p> <p>85 Ormas 1 Forum / pokja</p> <p>130 Orang 2 Kegiatan 80%</p> <p>80%</p> <p>100%</p>
11	Meningkatnya aktifitas pemuda, olahraga dan budaya.	<p>Jumlah sarana dan olahraga.</p> <p>Jumlah sarana klub olahraga yang ditingkatkan.</p> <p>Cakupan pembinaan olahraga.</p> <p>Cakupan pelatih bersertifikasi.</p> <p>Cakupan pembinaan atlet muda.</p> <p>Jumlah atlet berprestasi.</p> <p>Jumlah prestasi olahraga.</p> <p>Data potensi pemuda.</p> <p>Presentase organisasi pemuda yang aktif.</p> <p>Jumlah pementasan budaya lokal.</p> <p>Cakupan benda situs dan kawasan cagar budaya.</p>	<p>9 Lapangan 19 Klub 16 Orang 32 Orang 80 Orang 40 Orang 25 Orang 2 Dokumen 38% 15 3%</p>

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 55.629.097.366
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 17.198.787.316
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 1.237.935.800
4	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Rp 51.300.600
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 1.598.932.100
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 1.505.218.100

7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	6.344.877.000
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	569.614.100
9	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	199.825.000
10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	9.977.000
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	3.676.789.000
12	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	38.483.300.000
13	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	62.687.000
14	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial	Rp	50.000.000
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	2.125.787.000
16	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	2.135.670.000
17	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Rp	107.633.000
18	Program Pengembangan / Data Informasi	Rp	77.140.300
19	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp	66.109.000
20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	4.875.918.000
21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	5.335.080.000
22	Program Pengembangan Perumahan	Rp	12.961.938.000
23	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp	3.354.983.000
24	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	2.457.987.500
25	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	551.827.000
26	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	10.000.000
27	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	350.000.000
28	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	102.150.000
29	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	1.580.977.000
30	Program Kerjasama Pembangunan	Rp	119.792.000
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	165.000.000
32	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Rp	4.500.000
33	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	142.592.000

34	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	33.460.000
35	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	47.158.000
36	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	70.000.000
37	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	234.949.500
38	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	4.550.250.000
39	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	2.305.000.000
40	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Rp	125.891.500
41	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	304.985.000
42	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	111.246.000
43	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	70.000.000
44	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan	Rp	649.580.000
45	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Rp	2.398.000.000
46	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp	265.770.000
47	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Rp	20.332.600
48	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	13.549.000
49	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	16.007.585.900
50	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	84.825.545.700
51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	77.436.000
52	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	154.010.000
53	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp	6.351.200
54	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	813.877.000
55	Program Pengembangan Kemitraan	Rp	40.000.000
56	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	28.873.000
57	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	22.200.000
58	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	5.405.609.900
59	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	65.249.000
60	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	15.052.033.000

61	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp	16.538.000
62	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	28.996.000
63	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	823.800.000
64	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	80.338.000
65	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Rp	1.577.385.000
66	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Rp	453.343.800
67	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	Rp	74.577.900
68	Program Pendidikan Non Formal	Rp	1.765.100.000
69	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	150.000.000
70	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp	28.863.000
71	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	3.221.381.000
72	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	80.000.000
73	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp	39.805.000
74	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan	Rp	9.755.000.000
75	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rp	128.777.000
76	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	334.523.000
77	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	52.000.000.000
78	Program Upaya Pencegahan Pendayagunaan Narkoba	Rp	42.005.000
79	Program Identifikasi dan Deteksi	Rp	74.870.000
80	Program Pendidikan Luar Biasa	Rp	2.928.150.168
81	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Rp	59.975.300
82	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp	1.800.000.000
83	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	113.000.000
84	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Rp	3.433.500.000
85	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp	3.351.925.000
86	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	186.423.000
87	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Rp	860.527.000

88	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp	164.292.000
89	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial)	Rp	50.000.000
90	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	922.185.000
91	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp	29.775.000
92	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	46.328.000
93	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	977.993.500
94	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	341.596.000
95	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	1.156.447.000
96	Program Proteksi	Rp	89.178.000
97	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	9.160.100.000
98	Program Penanggulangan dan Pemulihan	Rp	115.800.000
99	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	190.625.000
100	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	48.980.000
101	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	141.738.000
102	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	404.750.000
103	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	250.000.000
104	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	4.770.200.000
105	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.308.934.000
106	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	510.405.800
107	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp	58.150.000
108	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	1.755.743.500
109	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	280.000.000
110	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	688.599.000
111	Program Kedaduratan dan Logistik	Rp	238.741.000
112	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	887.368.000
113	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah	Rp	467.781.000
114	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp	15.000.000

115 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	281.175.000
116 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp	162.005.000
117 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	772.836.000
118 Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	122.000.000
119 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	1.557.578.000
120 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	18.846.774.000
121 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Rp	210.733.000
122 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Rp	56.610.000
123 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp	225.000.000
124 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp	3.153.840.000
125 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp	58.500.000
126 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Rp	318.780.000
127 Program Pendidikan Tinggi	Rp	840.030.000
128 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp	14.042.761.000
129 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp	55.990.000
130 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	10.368.197.000
131 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp	647.428.250
132 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /	Rp	14.967.654.000
133 Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata		
134 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya	Rp	3.551.694.000
135 Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependudukan (PTK)	Rp	326.995.000
136 Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	Rp	34.975.912.000
137 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	9.691.829.000
138 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	26.918.164.000
139 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp	288.209.000
140 Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Rp	70.000.000

141 Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Serta Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	50.000.000
142 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	75.000.000
143 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp	116.592.500
144 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp	12.000.000
145 Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan	Rp	318.504.200
146 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp	865.300.000
147 Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	449.052.000
148 Program Prima Kesehatan	Rp	73.454.000
149 Program Pemanfaatan Ruang	Rp	109.200.000
150 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp	65.794.189.000
151 Program Penerapan Lampu Jalan	Rp	10.240.955.000
152 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	987.253.600

Pangkajene, 7 Januari 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. BOLLAH MANDO



